

**PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING,
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN
BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1980 - 2012**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

HADIDTYA SURYA NUGRAHA
NIM. C2B009064

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Hadidtya Surya Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1980-2012**
Dosen Pembimbing : Fitrié Arianti SE., M.Si

Semarang, 24 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Fitrié Arianti SE., M.Si)

NIP. 1978111162003122003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Hadidtya Surya Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : C2B009064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENANAMAN
MODAL ASING (PMA),
PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) DAN BELANJA
DAERAH TERHADAP PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1980-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 September 2014

Tim Penguji

1. Fitrie Arianti SE., M.Si (.....)
2. Dr. Hadi Sasana SE., M.Si (.....)
3. Arif Pujiyono SE., M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hadidtya Surya Nugraha, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1980 – 2012, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dalam cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 24 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Hadidtya Surya Nugraha)

NIM : C2B009064

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada :

1. Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Hadi Sasana, M.si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Fitrie Arianti, S.E, M.Si, selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah banyak meluangkan waktu mengarahkan dan membimbing serta memberi masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dan segala arahan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Kedua orang tua, Ayah Untung Riyono dan Ibu Retno Werdiningsih, terima kasih atas waktu, kasih sayang, motivasi, doa, dan segala bentuk dukungan, kehadirannya adalah anugrah yang tidak ternilai harganya yang Allah berikan kepada penulis.
5. Adikku tersayang, Ramadhani Qurnia Nugraha, yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang telah banyak memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Karyawan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberi bantuan berupa data dan referensi yang bermanfaat.
8. Keluarga besar IESP 2009 Reguler 1 yang memberikan keceriaan dan semangat serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Melati Westria Rahmanditta yang selalu memberikan semangat dan dukungan doa untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah dari awal sampai akhir.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, jika ada kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 24 September 2014

Penulis

Hadidtya Surya Nugraha

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah pada periode tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat *time series* dari tahun 1980 – 2012. Penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*, dimana variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen dan variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Belanja Daerah (BD) sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. Sedangkan PMA dan PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji F pada tingkat kepercayaan 95 % ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai F-hitung sebesar 21,72649 dengan nilai probabilitas 0,000 berarti variabel PMDN, PMA, dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap PDRB di Jawa Tengah.

Kata Kunci : *PDRB, PMA, PMDN, BD, dan Ordinary Least Square.*

ABSTRACT

The title of this study is “The influence of Foreign Direct Investment, Domestic Direct Investment and Regional Expenditure on the Gross Domestic Product in Central Java during 1980 – 2012”. This research purposed to know influence of Foreign Investment, Domestic Investment and Regional Expenditure on the Gross Domestic Product in Central Java on that period.

Data in this study is using secondary data which the characteristic is time series during 1980 – 2012. This study use Ordinary Least Square (OLS), which the variable Gross Domestic Product (GDP) as dependent variable and variable Foreign Direct Investment (FDI), Domestic Direct Investment (DDI), and Regional Expenditure (CE) as independent variable.

Based on the result show that Regional Expenditure have a positive relationship and significant. While Foreign Direct Investment and Domestic Direct Investment have a poitive relationship and not significant on Gross Domestic Product in Central Java. Based on result of F test with value credibility 95% ($\alpha = 5\%$) get a value F-count amount 21,72649 with probability 0,000 meaning that Domestic Investment, Foreign Investment and Regional Expenditure influential on Gross Domestic Product in Central Java.

Keywords : *GDP, FDI, DDI, CE and Ordinary Least Square.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	16

2.1.2	PDRB	18
2.1.3	Investasi	20
2.1.4	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	21
2.1.5	Penanaman Modal Asing (PMA)	22
2.1.6	Belanja Daerah	23
2.2	Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen	27
2.2.1	Hubungan Antara Investasi dengan Pertumbuhan PDRB	27
2.2.2	Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan PDRB	32
2.3	Penelitian Terdahulu	36
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis	39
2.5	Hipotesis	40
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian	42
3.2.1	Variabel Dependen	42
3.2.2	Variabel Independen	42
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian	43
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.5	Metode Pengumpulan Data	44
3.6	Metode Analisis Data	45

3.7	Pengujian Statistik	46
3.7.1	Uji t - Statistik	46
3.7.2	Uji F - Statistik	47
3.7.3	Koefisien Determinasi	48
3.8	Pendeteksian Asumsi Klasik	48
3.8.1	Deteksi Multikolinearitas	49
3.8.2	Deteksi Heterokedastisitas	49
3.8.3	Deteksi Autokorelasi	50
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	52
4.1.1	Kondisi Geografis Jawa Tengah	52
4.1.2	Perkembangan PDRB Jawa Tengah	53
4.1.3	Perkembangan Investasi Jawa Tengah	55
4.1.4	Perkembangan Belanja Modal Jawa Tengah	58
4.2	Hasil Regresi	60
4.3	Hasil Uji Statistik	61
4.3.1	Hasil Uji-t	61
4.3.2	Hasil Uji F	62
4.3.3	Hasil Koefisien Determinasi	63
4.4	Deteksi Asumsi Klasik	63
4.4.1	Deteksi Multikolinearitas	63

4.4.2	Deteksi Heterokedastisitas	64
4.4.3	Deteksi Autokorelasi	64
4.5	Intepretasi Ekonomi	65
4.5.1	Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap PDRB	65
4.5.2	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB	66
4.5.3	Pengaruh Daerah Modal terhadap PDRB	67
BAB V	PENUTUP	69
5.1	Kesimpulan	69
5.2	Keterbatasan	69
5.3	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perkembangan PDRB Provinsi – Provinsi di Jawa Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2010 – 2012	2
1.2 Perkembangan PDRB per kapita Provinsi – Provinsi di Jawa Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode 2010 – 2012	4
1.3 Penanaman Modal Asing & Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2012	7
1.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012	12
4.1 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	40
4.1 PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012	55
4.2 PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012	56
4.3 PMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2012	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan struktur ekonomi dan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. Pengangguran, keterbatasan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus diatasi. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merangsang proses produksi barang maupun jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah kekurangan modal (Hendra, 1991). Dalam konteks inilah pemerintah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk partisipasi ini adalah penanaman modal atau investasi.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan, sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital*

formation). Hal ini merupakan konsekwensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana prestasi dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menandakan kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang negatif, menandakan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut mengalami penurunan.

Tabel 1.1 menjelaskan perkembangan jumlah PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa :

Tabel 1.1

**Perkembangan PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa
Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2010-2012 (Dalam Milyar Rupiah)**

Provinsi	Nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2000			Pertumbuhan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
DKI Jakarta	395.622	422.237	198.270	6,50	6,73	6,53
Jawa Barat	322.224	343.111	364.405	6,20	6,48	6,20
Jawa Tengah	186.993	198.270	210.848	5,84	6,03	6,34
D.I.Y	21.044	22.132	23.309	4,88	5,17	5,32
Jawa Timur	342.281	366.983	393.666	6,68	7,22	7,27
Banten	88.552	94.207	100.000	6,11	6,39	6,15

Sumber : PDRB Provinsi – Provinsi di Indonesia, 2013.

Berdasarkan Tabel 1.1, selama tahun 2010 hingga tahun 2012, Provinsi Jawa Timur memiliki PDRB harga konstan tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,05 persen. Provinsi dengan PDRB lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,59 persen. PDRB yang lebih rendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dengan pertumbuhan sebesar 6,30 persen. Setelah Jawa Barat, Provinsi Banten memiliki nilai PDRB dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,21 persen. PDRB yang lebih rendah dari Banten adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir memang terus meningkat, tetapi pertumbuhan itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi lain yang ada di pulau Jawa. Hal ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji mengingat Jawa Tengah memiliki sumber daya yang cukup melimpah dan masih memungkinkan untuk diolah dengan lebih optimal lagi, prasarana penunjang relatif sama dibanding Provinsi lain, bahkan letak geografis Provinsi Jawa Tengah berada di tengah yang dinilai memiliki arti strategis tersendiri.

Nilai PDRB pada suatu tahun, bila dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut akan menghasilkan PDRB per kapita yang biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk pada tahun tersebut. Perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa
Menurut Harga Konstan Tahun 2000
Periode Tahun 2010-2012 (Dalam Ribu Rupiah)

Provinsi	Nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2000			Pertumbuhan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
DKI Jakarta	41.038	43.298	45.610	5,00	5,51	5,34
Jawa Barat	7.452	7.829	8.180	4,14	5,06	4,48
Jawa Tengah	5.775	6.113	6.337	5,56	5,85	3,66
D.I.Y	6.090	6.350	6.630	3,92	4,27	4,41
Jawa Timur	9.102	9.738	10.930	5,80	6,99	6,70
Banten	8.284	8.625	8.930	3,07	4,12	3,54

Sumber : PDRB Provinsi – Provinsi di Indonesia, 2013.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa selama tahun 2010-tahun 2012 provinsi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar Rp 43. 315. 380,- dan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,28 persen pertahun. Provinsi yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah dari DKI Jakarta yaitu Jawa Timur dengan rata-rata Rp 9.743.760,- dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,49 persen pertahun. Setelah Jawa Timur, Banten memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 8.613.920,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,58 persen pertahun. Dengan nilai PDRB per kapita lebih rendah dari Banten, Jawa Barat memiliki nilai sebesar Rp 7.820.283,- dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,56 persen pertahun. DIY memiliki nilai PDRB per kapita lebih rendah dari Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 6.357.030,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,20 persen pertahun. Nilai PDRB per kapita paling rendah dimiliki oleh Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 6.075.937,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,02 persen pertahun.

Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan di daerah Jawa Tengah dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini.. Sebagai pedoman perencanaan guna meningkatkan pembangunan di daerah Jawa Tengah pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan harapan kita semua.

Provinsi Jawa Tengah, yang mana satu tingkat di atas juru kunci perkembangan ekonomi diantara enam provinsi di Pulau Jawa. Dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, maka Jawa Tengah termasuk dalam kelompok “RR” (rendah-rendah) bersama dengan Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, baik dari segi PDRB per kapita maupun laju pertumbuhan ekonomi, kedua Provinsi tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Jawa Tengah adalah tulang punggung nasional karena menampung 16 persen lebih penduduk Indonesia (Emyll, 2005).

Sumber pertumbuhan ekonomi memang bukan hanya investasi, melainkan juga konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Akan tetapi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, oleh sebab itu pemerintah menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk meperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Tetapi dengan adanya pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Perubahan-

perubahan itu antara lain mencakup perubahan struktur ekonomi (dari pertanian ke industri atau jasa) dan perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar pemikiran mereka sebagai berikut : *Pertama*, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. *Ketiga*, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. *Keempat*, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif).

Tabel 1.3
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 – 2012

Tahun	Nilai Investasi PMA (Ribu US \$)	Nilai Investasi PMDN (Juta Rupiah)
1990	104.173,00	5.799.280,94
1991	251.038,84	695.397,30
1992	87.899,01	1.370.565,72
1993	96.384,37	2.984.208,94
1994	716.264,03	6.729.769,18
1995	506.894,19	1.442.162,24
1996	1.503.404,46	1.123.517,93
1997	432.325,55	1.953.196,71
1998	213.291,75	940.943,54
1999	159.658,44	300.574,44
2000	163.599,00	666.078,00
2001	66.847,00	582.220,56
2002	73.435,00	777.116,97
2003	60.680,29	1.062.158,55
2004	504.630,00	1.900.000,00
2005	550.512,44	5.756.775,87
2006	381.668,71	5.067.314,48
2007	317.165,10	1.191.875,23
2008	39.488,86	1.336.340,57
2009	101.433,75	2.570.249,50
2010	88.293,48	2.825.395,17
2011	173.979,71	4.839.778,59
2012	141.823,06	1.633.952,39

Sumber : Data BPS (Jawa Tengah Dalam Angka)

Berdasarkan Tabel 1.3. perkembangan realisasi penanaman modal selama dua puluh tiga tahun dari 1990 – 2012 PMA mengalami laju pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan kecenderungan yang menurun. Peningkatan realisasi penanaman modal asing terjadi pada tahun 1994 – 1995 yang mana pada tahun tersebut terdapat program repelita VI, sektor industri pengolahan merupakan sektor dominan pada tahun tersebut. Pada tahun 1997 – 1999 realisasi PMA mengalami penurunan yang cukup tajam hal ini disebabkan karena adanya krisis

ekonomi dan puncaknya terjadi situasi politik dan keamanan yang tidak kondusif sampai tahun 1999. Terlihat pada tahun 2006 – 2009 laju pertumbuhan realisasi PMA di Jawa Tengah mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada tahun 2008 penurunan yang terjadi pada periode tersebut dikarenakan belum berjalannya dengan baik sistem *one stop service* tetapi penurunan terbesar pada tahun 2008 sebesar -87,55% dipengaruhi oleh krisis global yang terjadi efeknya juga masih terasa pada tahun 2009. Serupa dengan pertumbuhan PMDN yang ada di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, terkadang terjadi peningkatan yang cukup besar tetapi tidak jarang mengalami pertumbuhan yang negatif tahun 1994 pada periode repelita IV Jawa Tengah mendapatkan alokasi dana yang cukup besar yang berasal dari pemerintah pusat, tetapi setelah itu pada tahun 1995 – 1996 pertumbuhan negatif akan tetapi pada tahun 1997 laju pertumbuhan kembali positif. Laju pertumbuhan yang positif tersebut tidak bertahan pada tahun 1998 – 1999 hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter.

Walaupun setelah krisis moneter tersebut kondisi perekonomian, sosial, politik dan keamanan masih belum baik tetapi adanya kepercayaan dari investor sehingga pada tahun 2000 – 2005 pertumbuhan kembali positif, walaupun setelah itu kembali penurunan pada tahun 2006 – 2007. Tumbuhnya perekonomian Jawa Tengah tidak bisa lepas dipisahkan dari peranan investasi yang masuk di wilayah tersebut. Dari data realisasi pada tabel PMA dan PMDN di Jawa Tengah mengalami fluktuasi, karena dengan kehadiran investasi melalui modal asing sangat diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Proporsi investasi PMDN maupun PMA serta menurunnya pertumbuhan investasi di Jawa Tengah tidak berarti pembangunan ekonomi berjalan lambat

dan begitu pula sebaliknya, karena yang penting bukan besarnya investasi dalam nilai uang atau jumlah proyek, tetapi bagaimana efisiensi atau produktivitas dari investasi tersebut.

Penanaman modal asing sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Sumantoro, 1983).

Penanaman modal asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui tambahan modal dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal. Selain itu, penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain-lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi asing sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan

taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang senada telah dilakukan oleh Effendi dan Soemantri (2003) menganalisis dampak PMA, tetapi tanpa PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1987-2000 (26 Provinsi). Hasilnya ditemukan bahwa PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang (Effendi dan Soemantri (2003) dalam Sidik dan Nuryadin (2008). Hasil penelitian Suryawati (2000) menunjukkan bahwa modal asing langsung yang masuk ke negara-negara Asia Timur, secara umum mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan PMA, namun demikian, hubungan ini hanya merupakan hubungan jangka pendek saja. Dalam uji ekonometrik jangka panjang dengan menggunakan metode ECM, hubungan jangka panjang antara PMA dan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di Indonesia dan Philipina.

Penelitian oleh Sodik dan Nuryadin (2008) menunjukkan bahwa variabel PMA maupun PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun investasi (baik PMA maupun PMDN) sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri.

Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk meningkatkan tingkat investasi anatara lain Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Jawa Tengah juga ikut berperan untuk meningkatkan iklim usaha dengan menciptakan iklim usaha kondusif lewat

pelayanan satu pintu (*One Stop Service*), perlindungan investasi (*Task force*), maupun pemberian insentif bagi penanam modal.

Kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dinilai terdapat cakupan yang sangat strategis dan berpotensi untuk mencapai target pertumbuhan investasi. Jawa Tengah selain potensial akan sumber-sumber bahan baku bagi industri juga sangat layak bagi pendirian industri karena di samping tenaga kerja dan upahnya murah juga tersedianya lokasi industri yang didukung oleh dua pelabuhan samudra di Semarang dan di Cilacap. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kemauan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor melalui beberapa kebijakan yang sifatnya di samping memberikan iklim yang mendorong, juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha.

Pembiayaan pembangunan daerah selain diperoleh dari penanaman modal swasta juga dari pemerintah yaitu belanja daerah. Hal ini disebabkan karena belanja daerah adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Belanja daerah akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dimana kenyataannya ketidakberhasilannya suatu daerah menarik modal di daerahnya sendiri disebabkan karena kurangnya prasarana yang tersedia. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah di dalam menyediakan sarana infrastruktur dapat dilihat dari nilai realisasi belanja daerah dalam APBD pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai belanja daerah, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga sebaliknya, dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut

berperan aktif di dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.4
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2012 (Ribu Rupiah)

Tahun	Belanja Daerah (Ribu Rupiah)
2005	2.936.310.815
2006	3.028.854.792
2007	4.794.746.491
2008	6.051.713.397
2009	6.380.477.669
2010	7.169.885.978
2011	5.846.515.369
2012	11.128.810.460

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013.

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat realisasi belanja daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja daerah dari tahun ke tahun selalu berubah. Belanja daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2012 dengan jumlah Rp. 11.128.810.460.

Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis apabila proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu dalam Priyo, 2006).

Dari uraian tersebut di atas yang mana begitu pentingnya peran dari modal untuk proses pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang dan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti akan

pengaruh dari adanya modal bagi pembangunan, sehingga mendorong dilakukannya penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980 - 2012”**

1.2 Rumusan Masalah

Kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dinilai terdapat cakupan yang sangat strategis dan berpotensi untuk mencapai target pertumbuhan investasi. Jawa Tengah selain potensial akan sumber-sumber bahan baku bagi industri juga sangat layak bagi pendirian industri karena di samping tenaga kerja dan upahnya murah juga tersedianya lokasi industri yang didukung oleh dua pelabuhan samudra di Semarang dan di Cilacap. Selain itu pemerintah Propinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor melalui beberapa kebijakan yang sifatnya di samping memberikan iklim yang mendorong, juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah relatif masih rendah padahal dengan kondisi dan potensi yang sangat baik, harusnya Propinsi Jawa Tengah bisa lebih baik lagi pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PMA, PMDN dan Belanja Daerah secara bersama – sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 1980 - 2012?

2. Bagaimana pengaruh PMA terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 1980 - 2012?
3. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 1980 - 2012?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 1980 - 2012?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah PMA, PMDN dan Belanja Daerah mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMA terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMDN terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi PDRB di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah penelitian yang ada serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan membuktikan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antara Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
4. Sebagai aplikasi dari teori – teori ekonomi, yaitu ekonomi makro sehingga dapat menambah referensi bagi peminat untuk mengetahui secara teoritis mengenai Produk Domestik Regional Bruto.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor - faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu “proses”, bukan merupakan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output perkapita“. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu

apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono, 2009).

Berdasarkan dua pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah: (Todaro, 2003)

Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

Kemajuan teknologi.

Model pertumbuhan Solow sebenarnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar (Widodo, 2006).

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan, yaitu : (Widodo, 2006)

1. Cara Produksi.

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Cara Pengeluaran.

Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

3. Cara Pendapatan.

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat nunjukan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang didapat tau diperoleh adalah :

1. PDRB atas dasar harga berlaku/nominal

- a. Mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/ provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

Mengetahui pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/provinsi.

2. PDRB atas dasar harga konstan

- a. Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

Mengetahui laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/ antar provinsi.

Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan

oleh masyarakat/ warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3 Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan - peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama

antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003).

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan memperluas kesempatan kerja yang produktif dan berarti akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaliran iklim investasi di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua undang-undang ini kemudian dilengkapi dan disempurnakan, dimana UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1970 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1970.

2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini menjelaskan bahwa “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang

modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang ini.

2.1.5 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain :

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

2.1.6 Belanja Daerah

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk ,2008) adalah “ semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:
 - a. Belanja pegawai,
 - b. Belanja barang,
 - c. Bunga,
 - d. Subsidi,
 - e. Hibah,
 - f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
 - a. Belanja modal tanah,
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin,
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan,
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya,
 - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)

3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tida biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,

bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - a. Belanja pegawai,
 - b. Belanja barang dan jasa,
 - c. Belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai,

- b. Belanja bunga,
- c. Belanja subsidi,
- d. Belanja hibah,
- e. Belanja bantuan sosial,
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat

penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

2.2 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen

2.2.1 Hubungan Antara Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2004), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang.

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono, 1992).

Menurut Todaro (1981) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu Negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru

dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk “*capital formation*” untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut. Pertama, kecilnya jumlah mutlak kapital material. Kedua, terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk. Ketiga dan yang terakhir adalah rendahnya investasi netto. Akibat keterbatasan tersebut,

Negara-negara berkembang mempunyai sumber daya yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia melalui investasi dibidang pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup dan kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal dan taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Arsyad, 1997).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini antara lain perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh adapula asumsi yang menyatakan bahwa dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada. Asumsi lain menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol). Asumsi yang terakhir menyatakan kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antar modal output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal output (*incremental Capital Output*

Ratio). Teori ini memiliki kelemahan yakni kecenderungan menabung dan rasio pertambahan modal output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu Negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan public di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Deddy, 2008).

Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan yang kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan investasi disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk

pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor bahkan faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal adalah tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara (Prasetyo, 2009).

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah. Dimana investasi itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Dengan semakin besarnya investasi baik PMDN maupun PMA maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN dan PMA memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

2.2.2 Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan PDRB

Menurut Halim (2004) belanja daerah merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya satu anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja daerah adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu Nordiawan (2006). Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Belanja daerah memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Belanja/biaya berdasarkan hubungannya dengan aktivitas di bagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan PP No. 15 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), belanja Modal, Belanja Tidak tersangka, dan Belanja Bantuan Keuangan. Sedangkan berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Klasifikasi belanja diperbaiki dan dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya tersebut. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno,2000).

Pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat. Pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan menurut dua cara yang terpisah. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa (G) yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan (Y) dan Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung), yang didapat oleh sektor swasta. (*Dornbusch dan Fischer, 1999*) Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam resesi, pajak harus dikurangi atau pengeluaran ditingkatkan untuk menaikkan output. Jika sedang berada dalam masa makmur (booming) pajak seharusnya dinaikkan atau pengeluaran pemerintah dikurangi agar kembali ke penggunaan tenaga kerja penuh.

Untuk memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suryawati (2000), Peranan Investasi Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Timur	Mengukur seberapa besar pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-Negara Asia Timur	Metode analisis <i>Error-Correction Model</i> (ECM)	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Investasi swasta, investasi pemerintah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modal asing langsung yang masuk ke negara-negara Asia Timur, secara umum mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan PMA, namun demikian, hubungan ini hanya merupakan hubungan jangka pendek saja.
2	Effendi dan Soemantri (2003), Analisis dampak PMA terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1987-2000	Mengukur seberapa besar pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1987 - 2000	Metode analisis <i>Error-Correction Model</i> (ECM)	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Penanaman Modal Asing	Hasilnya ditemukan bahwa PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang.

3	Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2008), <i>Determinan</i> Investasi di Daerah : Studi Kasus Provinsi di Indonesia	Mengukur indikator yang paling berpengaruh terhadap Investasi pada tiap daerah / provinsi di Indonesia	Metode analisis <i>Error-Correction Model</i> (ECM)	Dependen : Investasi Daerah (tiap Provinsi di Indonesia) Independen : PDRB, Ekspor, Indikator Infrastruktur (Listrik)	Dari ketiga indikator tersebut, PDRB dan listrik signifikan dengan arah yang berlawanan dengan teori. Indikator tingkat keterbukaan ekonomi (Ekspor) memiliki hubungan yang konsisten dengan teori meskipun dengan nilai koefisien yang relatif kecil. Sekaligus menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan perekonomian daerah belum begitu besar berperan dalam menarik investor.
4	Bambang Kustianto dan Istikomah (1999), Peranan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Mengukur seberapa besar pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Metode analisis <i>Error-Correction Model</i> (ECM)	Dependen : Pertumbuhan Ekonomi Independen : Penanaman Modal Asing	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan luar negeri (AID) dan tabungan domestik (S) memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sedangkan Penanaman

					Modal Asing (FDI) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Elvany Noor Afia (2010), Pengaruh PMA, PMDN, dan BM terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah	Mengukur pengaruh tiap indikator terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah	Metode analisis <i>Error-Correction Model</i> (ECM)	Dependen : PDRB Independen : PMA, PMDN, Belanja Modal	Hasil yang di dapat yaitu PMA, PMDN dan Belanja Modal berpengaruh terhadap nilai PDRB di Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

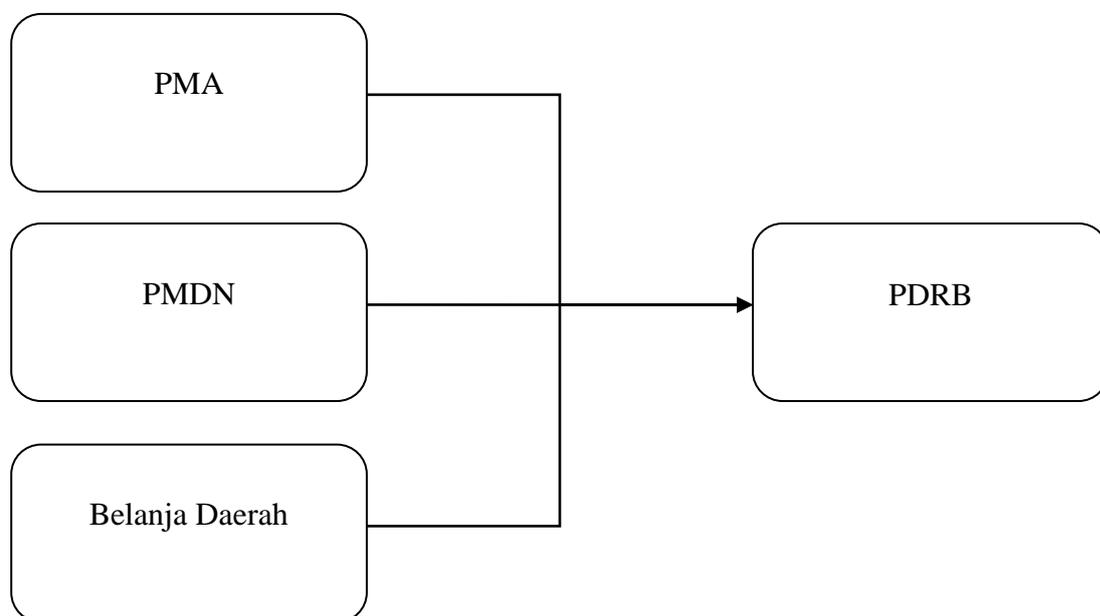
Kerangka Berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh investasi PMA, PMDN, dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Banyak sekali ahli-ahli ekonomi pembangunan menganggap modal sebagai sumber yang merupakan titik perhatian dalam teori pembangunan ekonomi. Namun demikian harus kita sadari bahwa pembangunan ekonomi yang mempunyai implikasi pertumbuhan ekonomi juga memerlukan berbagai faktor lainnya, seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya sistem pemerintahan yang baik, tingkat teknologi yang memungkinkan penggunaannya, sikap kehidupan masyarakat, tersedianya sumber alam dan sebagainya. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak mungkin dapat digerakkan tanpa adanya modal baik dari pemerintah maupun swasta. Sehingga seperti yang diutarakan Sadono Sukirno : “ahli-ahli ekonomi tetap yakin bahwa modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan” (Sukirno, 2002).

Dalam studi ini diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh penanaman modal. Sumber-sumber dana atau penanaman modal yang dimaksud dalam studi ini diperoleh dari pihak swasta yaitu PMA dan PMDN, sedangkan dari pemerintah sendiri yaitu, belanja modal.

Bentuk hubungan yang ingin ditunjukkan adalah investasi (PMA, PMDN, dan belanja modal) mempengaruhi PDRB Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari skema berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Dari gambar PMA, PMDN dan belanja daerah merupakan dana atau modal yang pada umumnya disebut dengan investasi, ketiga investasi tersebut kemudian di investasikan di berbagai jenis lapangan usaha dan menghasilkan produk barang dan jasa, kemudian melalui multiplier, dan setelah seluruh jumlah barang dan jasa dijumlahkan dalam kurun waktu tertentu, hasilnya disebut dengan PDB atau PDRB dan kemudian hari PDRB kita dapat menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

2.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara (Hasan, 2008). Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi di dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.
- H2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.
- H3 : Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana di dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian data ini diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Kuncoro, 2007).

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2007). Penelitian ini memiliki variabel penelitian sebagai berikut :

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

PDRB yaitu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dan dinyatakan dalam satuan juta Rupiah (Rp).

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (Arikunto, 2006). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

b. PMA (X_1)

PMA adalah realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di Propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan ribu dollar (\$).

c. PMDN (X_2)

PMDN adalah realisasi keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri di Propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan data nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp).

d. Belanja Daerah (X_3)

Belanja Daerah merupakan realisasi total belanja pemerintah di Propinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan juta rupiah (Rp).

3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PMA, PMDN, Belanja Daerah, dan PDRB Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1980-2012.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (time series) periode tahun 1980-2012. Data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Data penanaman modal asing di Jawa Tengah tahun 1980-2012, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah)

- b. Data penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah tahun 1980-2012, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah).
- c. Data PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan tahun 1980-2012, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi, BPS Provinsi Jawa Tengah)
- d. Data realisasi belanja daerah dalam Realisasi Anggaran Belanja Daerah Jawa Tengah tahun 1980-2012, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Penulis menggunakan data sekunder melalui pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian (Nazir, 1999). Pada penelitian ini metode dokumentasi yang dipakai untuk mengetahui data PMA, PMDN, Belanja Daerah dan PDRB Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1980-2012 bersumber dari Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain data-data laporan tertulis untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data melalui studi kepustakaan dari buku-buku, media massa dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pangkat kuadrat terkecil biasa atau *Ordinary Least Square* (OLS). Inti metode *Ordinary Least Square* (OLS) adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Kuncoro, 2007: 79).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (juta rupiah)

X1 : Tingkat Investasi PMDN (juta rupiah)

X2 : Tingkat Investasi PMA (ribu US \$)

X3 : Belanja Daerah (juta rupiah)

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi X1

β_2 = Koefisien regresi X2

β_3 = Koefisien regresi X3

e = Variabel pengganggu (*disturbance error*)

3.7 Pengujian Statistik

3.7.1 Uji t-Statistik

Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Gujarati,1999).

Hipotesis yang digunakan adalah :

- a. Hipotesis 1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_1 > 0$ Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

- b. Hipotesis 2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_2 > 0$ Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

- c. Hipotesis 3 : Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja daerah terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_3 > 0$ Ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja daerah terhadap PDRB Jawa Tengah.

Untuk mencari t hitung digunakan rumus :

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Keterangan:

T = nilai statistik

β_i = Koefisien regresi variabel

Se = Simpangan baku

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) derajat kebebasan (df) sebesar $(n - k)$, maka :

- Jika t hitung $>$ t tabel atau $-t$ hitung $<$ $-t$ tabel \rightarrow H_0 ditolak

- Jika $-t$ tabel = t hitung = $+t$ tabel \rightarrow H_0 diterima

3.7.2 Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - r^2) (n - k)}$$

Dimana nilai R^2 adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah sampel dan K adalah banyaknya parameter (Gujarati, 1999).

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dan derajat kebebasan (df) sebesar $(k-1) (n-k)$, maka :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (F_{\{\alpha, k-1, n-k\}}) \rightarrow H_0$ diterima
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (F_{\{\alpha, k-1, n-k\}}) \rightarrow H_0$ ditolak

3.7.3 Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) Besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial (R^2) (Algifari, 2000).

3.8 Pendeteksian Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

3.8.1 Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati: 1999). Jadi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Konsekuensi dari multikolinieritas adalah apabila ada kolinieritas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas antara lain dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan mengetahui seberapa jauh korelasinya (r^2) yang didapat dari hasil regresi bersama variabel independen dengan variabel dependen jika ditemukan nilai r^2 melebihi nilai R^2 pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika R^2 lebih besar dari semua r^2 maka menunjukkan tidak terdapatnya multikolinieritas pada persamaan yang diuji.

3.8.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya (Hanke & Reitsch dalam Koncoro, 2007: 96). Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam spesifikasi model. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dijumpai dalam data silang tempat daripada runtut

waktu, maupun juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji *White heteroskedasticity cross term* melalui alat bantu *software Eviews 6.0*. Pengambilan keputusan terdapat heteroskedastisitas atau tidak dalam hasil estimasi model maka harus ditentukan dahulu derajat kebebasan (*degree of freedom*) dimana df sama dengan jumlah variabel independen dalam model tidak termasuk konstanta. Jika nilai χ^2_{hitung} (nilai R^2 dikalikan jumlah data) $< \chi^2_{tabel}$ dan nilai probabilitasnya > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.8.3 Deteksi Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tidak adanya korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* auto korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi yang dipakai penulis dengan menggunakan uji Durbin Waston (Ghozali, 2001).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

1. Bila $Dw_{hit} > upper\ bound\ (du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.

2. Bila $D_w \text{ hit} < \text{lower bound (dl)}$ maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila $dl = D_w \text{ hit} = du$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
4. Bila $D_w \text{ hit} > (4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol ada autokorelasi negatif.
5. Bila $D_w \text{ hit} < (4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, tidak ada autokorelasi.
6. Bila $(4-du) = D_w \text{ hit} = (4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.